



## Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin Di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun

Ananda Dwi Arum <sup>1)</sup>; Tunggul Sihombing <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

<sup>2)</sup> Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: <sup>1)</sup> [ananda123.irc@gmail.com](mailto:ananda123.irc@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [tlumbantoruan@yahoo.co.id](mailto:tlumbantoruan@yahoo.co.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [15 Desember 2022]

### KEYWORDS

Effectiveness, Poverty, Family Hope Program (PKH)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

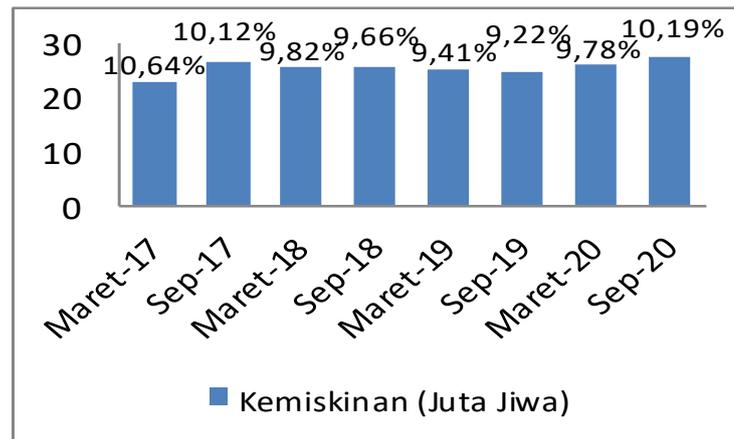
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan (balita dan ibu hamil), pendidikan (anak SD, SMP, dan SMA), dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas sosial). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin di Nagori Kandangan, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Nagori Kandangan masih belum efektif. Dari segi pencapaian tujuan masih terdapat keterlambatan waktu dalam penyaluran dana PKH dan adanya ketidaktepatan sasaran PKH. Pada indikator integrasi, PKH masih belum terintegrasi secara menyeluruh dan masih kurangnya pemahaman KPM terkait PKH karena kurangnya sosialisasi yang diadakan. Pada dimensi adaptasi, PKH masih belum mampu menyesuaikan diri dengan keinginan KPM khususnya dalam membuka usaha.

### ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance provided to poor families with components of health (toddlers and pregnant women), education (elementary, junior high, and high school children), and social welfare (elderly and socially disabled). This study aims to determine and describe the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in an effort to reduce the burden of spending on poor families in Nagori Kandangan, Pematang Bandar District, Simalungun Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. The results showed that PKH in Nagori Kandangan is still not effective. In terms of achieving goals, there are still delays in the distribution of PKH funds and the inaccuracy of PKH targets. In integration indicators, PKH is still not fully integrated and there is still a lack of understanding of KPM related to PKH due to the lack of socialization held. In the adaptation dimension, PKH is still not able to adapt to the wishes of KPM, especially in opening a business.

## PENDAHULUAN

Salah satu persoalan kompleks yang bersifat multidimensi terkait dengan berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu adalah kemiskinan. Kondisi miskin di Indonesia telah berdampak dengan semakin meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat yang membutuhkan penanganan yang terpadu. Oleh karena itu, pemerintah selalu menjadikan masalah kemiskinan sebagai prioritas untuk dicari jalan keluarnya. Faktor permasalahan kemiskinan di Indonesia yang bermacam-macam mulai dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja, kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan distribusi pendapatan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di Indonesia dari bulan September 2019 hingga bulan September 2020.

**Grafik 1 Persentase Kemiskinan di Indonesia 2017-2020**

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Kemiskinan pada bulan September 2019 meningkat hingga September 2020. Pada Maret 2020 kemiskinan mencapai 26,42 juta jiwa (9,78 %), meningkat 1,63 juta jiwa (0,56 %) terhadap September 2019 dan meningkat 1,13 juta jiwa (0,41 %) terhadap Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang rendah juga menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Kualitas hidup penduduk miskin mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah mengadakan berbagai program yang berlaku secara nasional untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Penulis melihat salah satu program yang menjadi andalan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ialah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana PKH diterapkan pada tahun 2007 sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan mutu dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Penulis menemukan bahwa PKH dilaksanakan di 7 provinsi dengan melibatkan 500.000 rumah tangga sangat miskin yang akan diberikan dana antara Rp600.000 sampai Rp2,2 juta pertahun dengan periode penyaluran pertiga bulan. Pada tahun 2020, tercatat jumlah graduasi KPM PKH telah melampaui target yang ditentukan, yaitu 1 juta KPM. Sebanyak 1.179.304 KPM telah menyatakan keluar dari kepesertaan. Dari total KPM graduasi tersebut, tercatat dua jenis graduasi, yaitu graduasi secara mandiri (sukarela mengundurkan diri) sebanyak 341.773 KPM dan graduasi secara alamiah (tidak memiliki unsur penerima) sebanyak 837.531 KPM. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perekonomian KPM mulai membaik, sehingga banyak dari mereka yang suka rela mengundurkan diri dari KPM PKH.

Beberapa provinsi yang paling banyak menggraduasi KPM PKH yaitu Jawa Tengah sebanyak 258.989 KPM, Jawa Timur sebanyak 225.183 KPM, dan Jawa Barat sebanyak 217.184 KPM. Untuk wilayah di luar Jawa, provinsi Lampung menduduki peringkat pertama sebanyak 48.558 KPM, dan Sumatera Utara di posisi kedua sebanyak 40.520 KPM, dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 35.923 KPM. PKH yang secara nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2007 mulai berkembang di seluruh pelosok yang ada di provinsi Indonesia.

Penulis melihat bahwa pelaksanaan PKH di Sumatera Utara sejak tahun 2008 tepatnya di Kota Medan dan di Kabupaten Simalungun mulai dapat dilaksanakan sejak tahun 2015 bersamaan dengan Kabupaten/Kota lainnya dan pada tahun 2016 pelaksanaan PKH sudah berkembang ke 33 Kabupaten/Kota untuk seluruh Kecamatan. Pada tahun 2017, sebanyak 17.457 warga kurang mampu di Kabupaten Simalungun terdaftar dalam PKH. Pemberian kartu PKH kepada yang berhak secara bertahap mulai tanggal 3 Agustus 2017 dan berakhir 17 Agustus 2017 dengan total sebesar Rp1,8 juta. Adanya PKH diharapkan dapat memudahkan masyarakat miskin untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan yang ada di sekitar mereka, namun PKH di Nagori Kandangan masih terdapat permasalahan yang dihadapi.

Teori yang penulis gunakan sebagai pemandu ialah teori efektivitas dari Duncan. Efektivitas dapat diartikan dengan ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, di mana efektivitas memiliki tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan



adaptasi Duncan (dalam Steers, 1985:53). Terkait dengan efektivitas PKH di Nagori Kandangan, penulis menemukan permasalahan seperti penyaluran dana PKH yang tidak tepat waktu, di mana dalam penyaluran dana kepada masyarakat masih mengalami keterlambatan bahkan terdapat KPM yang sama sekali tidak menerima dana tersebut. Kurun waktu dalam penyaluran bantuan juga dapat dikategorikan lama, tiga bulan sekali dengan jumlah yang tidak mencukupi atau tidak seimbang. Dengan kata lain, dana yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan KPM khususnya dalam biaya sekolah anak, dan apabila kebutuhan sekolah anak meningkat, maka bantuan PKH tersebut tidak cukup dan tidak seimbang dalam jangka waktu tiga bulan tersebut. Selain itu, terkait dengan ketidaktepatan sasaran dalam pendataan KPM, di mana terdapat masyarakat yang mampu menjadi KPM dan masyarakat miskin tidak menjadi KPM.

Penulis juga menemukan permasalahan lain, yaitu tidak terintegrasinya PKH dengan Pangulu Nagori Kandangan yang seharusnya berperan dalam pendataan calon KPM dan juga Camat Pematang Bandar yang berperan menyampaikan data pendaftaran KPM kepada Bupati. Selain itu juga, Kurangnya pemahaman KPM mengenai PKH tersebut, baik dari tujuan maupun mekanisme dan bagian-bagiannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan KPM tidak memahami dengan jelas tentang PKH. Mereka hanya mengetahui bahwa PKH merupakan program bantuan untuk masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana tersebut untuk keperluan yang tidak seharusnya. Kurangnya sosialisasi juga mengakibatkan masyarakat tidak tertib dalam mengambil bantuan tersebut. Hal ini mengakibatkan ada sekitar 6 orang masyarakat yang dananya tidak tersalur, namun di data sudah keluar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penyelewengan dalam pengambilan dana tersebut.

Adanya bantuan PKH juga membuat masyarakat menjadi ketergantungan dengan bantuan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan dari PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat KPM. Perubahan nyata dapat diukur dari sejauh mana suatu program memberikan dampak kepada masyarakat. Namun perubahan masyarakat tersebut tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan PKH dalam menyesuaikan diri (adaptasi) dengan keinginan masyarakat KPM, di mana KPM ingin membuka usaha untuk menciptakan kemandirian yang dapat mengurangi beban pengeluaran mereka, namun PKH tidak mendukung dan tidak memberikan modal, padahal di Kecamatan lain PKH memberikan modal usaha kepada KPMnya.

## LANDASAN TEORI

Teori yang penulis gunakan sebagai pemandu ialah teori efektivitas dari Duncan (dalam Steers, 1985:53) di mana efektivitas diartikan dengan ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Adapun indikator efektivitas menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53) yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Mahmudi (2005:92) berpendapat, "Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan".

Selain itu, Kurniawan (2005:109) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktu atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016:9). Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realitas dari masalah yang akan dielaborasi oleh penulis dengan menggunakan data-data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Nagori Kandangan,

Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Adapun untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan penulis ialah dinas sosial, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Dengan demikian, penulis memilih Aplikator Pangkalan Data (APD) PKH, Koordinator Kecamatan (Pendamping) PKH Nagori Kandangan, Kepala Pangulu Nagori Kandangan, KAUR Pemerintahan, Kepala Lorong Nagori Kandangan, dan masyarakat miskin Nagori Kandangan selaku sasaran dari program ini sebagai informan dalam penelitian ini. Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data dalam berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang selanjutnya dideskripsikan dan dikategorisasikan, kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen kesehatan (balita dan ibu hamil), pendidikan (anak SD, SMP, dan SMA), dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas sosial). PKH adalah program penanggulangan kemiskinan yang terinspirasi dari program internasional *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk/jasa keuangan formal kepada KPM.

Penulis melihat PKH di Nagori Kandangan, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dilaksanakan sejak tahun 2015. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis mengkaji efektivitas PKH di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

### **Pencapaian Tujuan**

Penulis melihat pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Duncan (dalam Steers, 1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Pentahapan diperlukan dalam pencapaian tujuan agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Penulis menemukan bahwa pencapaian tujuan menjadi salah satu penentu untuk melihat keefektifan suatu program ataupun kegiatan. Adapun tujuan PKH ialah meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, menciptakan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, di mana pada PKH ini memiliki komponen yang telah ditetapkan, yaitu komponen pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, di mana masing-masing komponen mendapatkan bantuan uang yang telah disediakan pada program ini.

### **Ketepatan Waktu**

Penulis melihat bahwa keberhasilan suatu program dapat dilihat dari ketepatan waktu program tersebut. Tepat waktu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. PKH merupakan program bantuan yang disalurkan dalam waktu tiga bulan sekali dan pada saat pandemi, bantuan disalurkan sebulan sekali.

Penulis menemukan bahwa terdapat masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan PKH tersebut. Bahkan terdapat masyarakat yang sudah terdaftar menjadi KPM PKH tetapi dana PKH tidak tersalurkan ke rekening KPM tersebut. Suatu program dikatakan efektif apabila terlaksana tepat pada waktunya. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Sutrisno (2007:125-126) bahwa tolak ukur efektivitas program ialah terdiri dari lima kriteria, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Tepat waktu berarti



suatu tindakan berjalan dan terlaksana dengan tepat pada waktunya. Namun PKH di Nagori Kandungan masih tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan jadwal dalam penyaluran bantuan dana tersebut.

Selanjutnya, penulis melihat terkait jadwal penyaluran dana PKH yang masih sering mengalami keterlambatan, di mana pada tahun 2021 penyaluran dilakukan pada bulan November. Penyaluran tersebut juga tidak merata karena terdapat KPM yang tidak mendapat bantuan tersebut. Seharusnya bantuan tersebut diberikan tiap tiga bulan sekali, akan tetapi ada masyarakat yang bahkan sampai empat bulan juga belum menerima bantuan. Selain itu, terdapat masyarakat yang menganggap bahwa bantuan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan KPM, khususnya biaya pendidikan anak.

Salah satu tujuan dari program ini ialah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, sebagaimana yang tertera pada pedoman PKH 2021. Namun kenyataannya, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat hanya habis dalam beberapa hari dan tidak dapat digunakan untuk menabung ataupun membuka usaha. Total bantuan yang diterima oleh salah satu KPM kategori anak SMA yaitu sebesar Rp500.000, dalam jangka waktu tiga bulan. Besarnya beban pengeluaran KPM tersebut dalam waktu 3 bulan yaitu Rp920.000 dengan besar biaya sekolah selama sebulan Rp65.000, biaya PKL Rp300.000, biaya transportasi selama 3 bulan Rp360.000, biaya kesehatan Rp65.000.

Berdasarkan hasil interpretasi penulis, meskipun bantuan tersebut akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, namun bantuan PKH tidak cukup signifikan, hal ini terlihat dari besar beban pengeluaran selama 3 bulan yaitu Rp920.000 di luar dari perlengkapan seperti seragam, alat tulis dan uang buku, dan bantuan yang diberikan sebesar Rp500.000, jika dikurangkan menjadi Rp420.000. Bantuan tersebut akan signifikan jika digabungkan dengan bantuan lain seperti bantuan subsidi minyak goreng yang diberikan sebesar Rp300.000 dalam jangka waktu 3 bulan.

Besarnya nominal bantuan yang telah ditentukan menjadi batasan bagi masyarakat dalam memanfaatkan uang tersebut. Jumlah bantuan yang diberikan sudah ditetapkan dari pusat untuk kategori lansia, balita dan penyandang disabilitas sebesar Rp600.000 pertiga bulannya, untuk anak SD sebesar Rp225.000 pertiga bulannya, untuk anak SMP sebesar Rp375.000 pertiga bulan dan untuk anak SMA sebesar Rp450.000 pertiga bulan.

**Ketepatan Sasaran**

Tepat sasaran berarti anggaran dapat direalisasikan dan diperoleh oleh mereka yang menjadi sasaran dari program yang dimaksud.



**Bagan 1 Target Konkrit Program Keluarga Harapan**

*Sumber: Dokumentasi peneliti, 2022*

Dari bagan tersebut penulis melihat bahwa target konkrit dari PKH ini ialah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Masyarakat miskin yang dimaksud ialah masyarakat yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/SMK/MA atau sederajat, dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016, terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia dimulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan hasil observasi mengenai sasaran PKH, penulis menemukan bahwa terdapat 6 KPM yang mampu dan bahkan memiliki usaha dagang dan juga rumahnya bagus tetapi menjadi KPM PKH. Selain dari 67 KPM PKH, terdapat 11 kepala keluarga yang layak menjadi KPM, akan tetapi ke 11 kepala keluarga tersebut tidak terdaftar menjadi KPM PKH.

Penulis juga melihat, bahwa PKH masih tidak tepat sasaran, di mana Keplor Huta V, Huta I, dan Huta IV melihat terdapat warga miskin yang tidak terdaftar PKH. Hal tersebut dikarenakan penggunaan data lama masyarakat yang sudah masuk ke DTKS sejak tahun 2011. Perangkat desa tidak mengetahui pendataan dari PKH. Menurut pendapat dari Pangulu Nagori Kandangan bahwa data tersebut sudah ada dari bantuan sebelumnya. Meskipun data berasal dari DTKS, namun masih terdapat masyarakat yang miskin tidak terdaftar dan yang mampu menjadi menerima bantuan PKH tersebut. Penentuan KPM PKH seharusnya berasal dari masyarakat yang mencalonkan diri ke perangkat desa terlebih dahulu, namun di Nagori Kandangan data tersebut merupakan data lama yang sudah ada sejak tahun 2011. Masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi KPM PKH harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, PKH dari segi pencapaian tujuan masih mengalami keterlambatan waktu dalam penyaluran dana dan terdapat masyarakat yang tidak menerima bantuan. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari Pendamping PKH yang merupakan pihak koordinasi yang diutus untuk membantu dan mengawasi KPM di Nagori Kandangan. Kurangnya pengawasan dari Pendamping PKH mengakibatkan adanya ketidaktepatan sasaran KPM PKH, di mana terdapat masyarakat yang mampu menjadi KPM dan masyarakat miskin lansia tidak terdaftar KPM, serta bantuan PKH tersebut dianggap tidak mencukupi kebutuhan lansia dan anak sekolah.

Ketidaktepatan sasaran dan ketidaktepatan waktu mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan dari program tersebut, hal ini dikarenakan tepat sasaran dan kurun waktu merupakan faktor dari pencapaian tujuan. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Duncan (dalam Steers, 1983:53) bahwa pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya yang harus dipandang sebagai suatu proses, di mana pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan tepat sasaran yang merupakan target konkrit. Apabila pelaksanaan PKH tidak tepat waktu dalam penyaluran dana dan tidak tepat sasaran dalam memilih KPM, maka akan mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan dari PKH tersebut.

### **Integrasi**

Penulis melihat bahwa integrasi merupakan indikator efektivitas selanjutnya, di mana Duncan (dalam Steers, 1985:53) melihat integrasi sebagai pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi merupakan pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan terstruktur.

Dalam hal pendataan, calon KPM harus terintegrasi antara Keplor Nagori Kandangan, Pangulu Nagori Kandangan, Camat Pematang Bandar, Bupati Kabupaten Simalungun, Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Gubernur dan Kementerian Sosial. Integrasi tersebut terjadi di mana keluarga miskin yang mendaftarkan diri ke Pangulu Nagori Kandangan, yang selanjutnya data tersebut didaftarkan ke Bupati melalui Camat Pematang Bandar. Data tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, yang kemudian hasil tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Kementerian Sosial yang menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data yang terdapat di DTKS kemudian ditetapkan sebagai penerima program bantuan dan data tersebut masuk kembali ke Dinas Sosial Kabupaten Simalungun pada unit Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, yang selanjutnya disampaikan kepada Pendamping PKH di Nagori Kandangan sebagai koordinator lapangan yang mengetahui situasi di lapangan.

Namun, penulis menemukan bahwa pendataan KPM di Nagori Kandangan tidak sesuai dengan alur yang seharusnya. Pendataan KPM di Nagori Kandangan tidak diketahui oleh pemerintah Nagori Kandangan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa pendataan tidak berasal dari Kantor Nagori dan masyarakat juga tidak mendaftarkan diri ke Kantor Nagori, melainkan calon KPM diminta secara langsung oleh Kepala Lorong untuk mengumpulkan  *fotocopy*  KTP dan KK. Data KPM tersebut berasal dari DTKS yang diberikan langsung oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Simalungun kepada Pangulu Nagori Kandangan yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat Nagori Kandangan sebagai penerima PKH melalui Keplor.

Pemilihan KPM PKH sudah ditentukan dan KPM tidak mendaftarkan diri ke Pangulu Nagori Kandangan. Hal ini dikarenakan data-data KPM yang sudah masuk dari tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut merupakan data-data yang telah lama ada dan tidak melakukan pendataan ulang di Nagori Kandangan. Oleh karena itu, integrasi PKH di Nagori Kandangan hanya terjadi antara Dinas Sosial Kabupaten Simalungun pada unit Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,



Kementerian Sosial, dan Pendamping PKH yang melihat langsung kondisi di lapangan, serta KPM PKH sebagai penerima manfaat.

Hal ini mengakibatkan terjadi ketidaksesuaian antara data yang ada di DTKS dengan kondisi kemiskinan yang ada di Nagori Kandangan. Dari 67 KPM PKH, terdapat 6 KPM yang tergolong mampu dan terdapat 11 kepala keluarga di luar KPM tersebut yang layak menerima bantuan PKH. Selain itu, kurangnya pengawasan pendamping di lapangan yang mengakibatkan hal tersebut tetap terjadi dan tidak ada pembaharuan. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan pendamping PKH selaku pihak yang memantau segala perubahan yang ada di KPM.

Penulis juga melihat bahwa integrasi menyangkut proses sosialisasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Duncan (dalam Steers, 1985:53) bahwa integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Proses sosialisasi di Nagori Kandangan dilakukan oleh Pendamping PKH sebagai pihak yang langsung turun ke lapangan. Dengan adanya sosialisasi, maka masyarakat akan memahami suatu program dengan baik sehingga dapat dengan mudah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tugas seorang pendamping selain memastikan KPM memperoleh bantuan komplementer, melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH, juga melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM PKH, serta masyarakat umum. Pendamping PKH menyampaikan informasi terkait dengan PKH ke KPM melalui pertemuan kelompok yang dilakukan seminggu sekali.

Penulis melihat bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada bulan April 2021 dengan dihadiri oleh 67 KPM. Pendamping PKH memberikan arahan dan bimbingan dalam penggunaan uang PKH. Tugas pendamping melakukan pertemuan kelompok atau sosialisasi kepada masyarakat KPM PKH seminggu sekali. Namun pertemuan kelompok ini dilakukan sebulan sekali dan saat masa pandemi mereka jarang melakukan pertemuan dan bahkan tidak pernah melakukan pertemuan kelompok dan terlihat pertemuan terakhir dilaksanakan pada bulan April 2022. Hal inilah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait PKH tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai anggota PKH tidak paham dengan program tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa PKH ini adalah program untuk membantu masyarakat miskin. Masyarakat tidak mengetahui lebih jelas tentang PKH khususnya tujuan dari PKH itu sendiri. Terdapat juga masyarakat yang tidak dapat membedakan antara bantuan PKH dengan bantuan lainnya. Bantuan PKH hanya berupa pemberian uang dan untuk pemberian sembako seperti beras, ayam, telur dan lainnya itu merupakan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).

Selain masyarakat tidak paham tentang program tersebut, masyarakat juga menjadi salah memfungsikan uang bantuan PKH. Bantuan yang diberikan untuk biaya anak sekolah tetapi digunakan untuk keperluan yang tidak seharusnya. Selain itu, kurangnya arahan dan pengawasan dari pendamping mengakibatkan masyarakat tidak patuh dalam pengambilan dana PKH. Pendamping telah mengarahkan penarikan uang di Agen Mandiri Pak Lingling, namun masyarakat banyak yang mengambil di tempat lain.

Berdasarkan hasil observasi penulis tentang masalah yang terjadi akibat lokasi penarikan yang tidak seharusnya, bahwa terdapat 6 KPM PKH kategori lansia yang tidak mendapat bantuan dikarenakan tidak patuh dalam memilih lokasi penarikan. Besarnya bantuan yang mereka terima yaitu ada yang Rp600.000, ada yang Rp375.000, dan bantuan tersebut tidak sampai ke tangan masyarakat. Pada saat bantuan PKH tersalur bersamaan dengan bantuan BPNT, masyarakat melakukan penarikan di salah satu koperasi yang ada di Nagori Kandangan yang dianggap oleh masyarakat lebih dekat. KPM hanya menerima bantuan BPNT dan tidak menerima bantuan PKH. Tidak patuhnya KPM terkait tempat melakukan pencairan bantuan, mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sehingga dana yang seharusnya sudah masuk ke rekening, tetapi KPM tidak menerima dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, PKH masih belum terintegrasi kepada KPM PKH. Pemahaman masyarakat tentang PKH masih kurang dan juga terdapat ketidakpatuhan KPM dalam lokasi penarikan bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada KPM PKH. Sosialisasi yang seharusnya dilakukan seminggu sekali namun, dilakukan sebulan sekali bahkan saat pandemi tidak melakukan sosialisasi.

### **Adaptasi**

Dalam menjelaskan konsep adaptasi, penulis menggunakan pendapat Duncan (dalam Steers, 1985:53) yang melihat adaptasi sebagai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penulis melihat bahwa kemampuan adaptasi dapat tercapai apabila suatu organisasi

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan dapat melakukan pembaharuan serta dapat mengikuti perkembangan yang ada. Selain itu, kemampuan adaptasi juga dapat tercapai apabila masyarakat mendapat kepuasan dari pelayanan organisasi tersebut. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat menciptakan perubahan nyata ke arah yang lebih baik.

PKH merupakan bantuan yang berbeda dengan bantuan lainnya, di mana PKH menciptakan kemandirian masyarakat dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan mampu meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa terdapat pembinaan-pembinaan bagi masyarakat KPM agar mampu mengelola bantuan yang diterima. Hal ini bertujuan untuk mengubah masyarakat tersebut.

PKH membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bantuan yang diberikan sesuai dengan kategori dari KPM, di mana bantuan dengan kategori anak sekolah merupakan bantuan untuk memenuhi hal pendidikan yang akan digunakan untuk membayar uang sekolah, uang buku, perlengkapan, seragam, dan keperluan sekolah lainnya. Bantuan kategori ibu hamil dan baliti merupakan bantuan dalam hal kesehatan yang digunakan untuk membeli susu, vitamin, biaya berobat, dan biaya lainnya. Bantuan kategori disabilitas sosial dan lansia merupakan bantuan dalam hal kesejahteraan sosial yang digunakan untuk keperluan hidup lansia dan disabilitas berat.

Namun, penulis menemukan bahwa bantuan yang diberikan belum sesuai antara jumlah nominal yang diterima KPM dengan kebutuhan KPM tersebut. Untuk melihat kebutuhan KPM PKH, maka diutuslah seorang pendamping yang akan melihat kondisi KPM di Nagori Kandangan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat meskipun sudah mengurangi beban pengeluaran KPM, namun belum menciptakan kemandirian bagi masyarakat, dikarenakan kurangnya kemampuan menyesuaikan diri (adaptasi) PKH terhadap perubahan yang ada di lapangan khususnya KPM PKH di Nagori Kandangan.

Efektivitas PKH dapat dicapai apabila PKH mampu melakukan adaptasi dengan perubahan yang ada di masyarakat, seperti perubahan pola pikir dan mampu melihat apa yang diinginkan oleh KPM khususnya dalam membuka usaha. Dengan mendirikan usaha, maka dapat menciptakan kemandirian KPM tersebut dalam mengelolah perekonomiannya. Adanya edukasi tentang menabung dan membuka usaha membuat KPM PKH berpikir untuk mendirikan usaha, akan tetapi KPM tersebut terkendala oleh modal yang tidak ada.

Penulis melihat bahwa KPM PKH ingin menjalankan usaha, namun mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk mendirikannya. Adanya usaha yang didirikan oleh masyarakat dapat menciptakan kemandirian dan juga dapat meningkatkan pendapatan KPM PKH tersebut. Akan tetapi, PKH tidak mampu melihat dan menyesuaikan dengan keinginan KPM PKH di Nagori Kandangan untuk membuka usaha. Sebenarnya dalam PKH terdapat yang namanya KUBE (Kegiatan Usaha Bersama). KUBE merupakan usaha bersama untuk menciptakan kemandirian bagi masyarakat. PKH memberikan bantuan berupa modal kemudian masyarakat menggunakan modal tersebut untuk membuka usaha ataupun berladang secara berkelompok. Pola pikir masyarakat yang ingin menjalankan usaha sudah terbangun, namun di Nagori Kandangan KUBE tidak dilaksanakan sementara di kecamatan lain KUBE berjalan.

Penulis menginterpretasi bahwa jika KUBE dijalankan di Nagori Kandangan, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi KPM. Dengan adanya KUBE, KPM dapat mengelolah ekonominya sendiri baik dengan cara membuka usaha, berternak, ataupun berladang yang merupakan potensi di Nagori Kandangan, sehingga tidak akan bergantung kepada bantuan tunai PKH tersebut. KUBE yang apabila dilaksanakan di Nagori Kandangan, akan sangat efektif dikarenakan di Nagori Kandangan sendiri tidak memiliki Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) yang akan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan adanya KUBE akan sangat membantu KPM dalam mengelolah ekonominya. Namun, KUBE tidak dilaksanakan di Nagori Kandangan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan tentang pelaksanaan KUBE, bahwa di Nagori Kandangan pernah membahas tentang usaha bersama. KPM PKH dibagi menjadi 3 kelompok dan mereka diminta untuk menuliskan usaha apa yang mereka ingin jalankan. Usaha tersebut boleh berdagang, berternak ataupun bertani. Namun sampai saat ini di Nagori Kandangan tidak terdapat KUBE yang modalnya dari PKH. Peneliti melihat bahwa KPM PKH ingin dan antusias untuk menjalankan suatu usaha, namun tidak memiliki modal.

Penulis melihat bahwa pembentukan kelompok usaha yang dibentuk atas arahan pendamping PKH tidak terlaksana di Nagori Kandangan dikarenakan PKH tidak jadi memberikan modal kepada kelompok KPM tersebut, padahal KUBE dapat menjadi sarana untuk menciptakan kemandirian bagi KPM PKH. KUBE dapat menciptakan kemandirian bagi masyarakat KPM.



Penulis melihat bahwa KUBE 39% sangat efektif dan 61% efektif. Manfaat KUBE sendiri ialah peningkatan pendapatan pengelola e-Warong KUBE PKH (KPM) untuk menuju graduasi keluarga miskin. Namun, di Nagori Kandangan KUBE tidak terlaksana. Kurangnya kemampuan beradaptasi PKH dengan perubahan pola pikir KPM PKH mengakibatkan PKH tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh KPM tersebut. Dengan adanya usaha yang dijalankan oleh KPM dapat menciptakan kemandirian yang dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, namun karena tidak memiliki modal maka KPM tidak menjalankan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, penulis menyimpulkan bahwa PKH dari segi adaptasi masih belum menciptakan kemandirian KPM yang dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Hal ini dikarenakan PKH tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pola pikir masyarakat untuk membuka usaha. PKH tidak mampu menyesuaikan dengan keinginan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum efektif dengan indikator efektivitas yang harus dipenuhi. Alasannya yaitu, dari segi pencapaian tujuan bantuan yang diterima KPM PKH dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan KPM khususnya dalam pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga dalam hal penyaluran dana PKH masih tidak tepat waktu kepada KPM PKH di Nagori Kandangan dan masih tidak sepenuhnya mengenai sasaran target konkrit. Adanya ketidaktepatan sasaran, di mana terdapat masyarakat miskin yang tidak terdaftar PKH dan terdapat pula masyarakat tergolong mampu menjadi peserta PKH. Pada indikator integrasi juga masih belum efektif, hal ini dikarenakan PKH di Nagori Kandangan tidak melibatkan Pangulu Nagori Kandangan dan Camat Pematang Bandar yang merupakan pihak yang mengetahui kondisi penduduknya. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan KPM PKH tidak paham secara rinci mengenai program tersebut.

Pada indikator adaptasi, PKH juga belum efektif dikarenakan PKH tidak mampu melihat apa yang diperlukan oleh KPM dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keinginan dan kebutuhan KPM PKH di Nagori Kandangan khususnya untuk membuka usaha yang akan menciptakan kemandirian bagi KPM dan sangat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin di Nagori Kandangan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan terkait dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yaitu:

1. Dalam hal tercapainya tujuan diperlukan pertimbangan kembali mengenai jumlah bantuan dana, karena bantuan yang diterima masyarakat dianggap tidak mencukupi kebutuhan sekolah anak dan kesehatan. Dalam penyaluran bantuan PKH perlu memperhatikan ketepatan waktu, agar setiap KPM PKH menerima bantuan sesuai waktunya. Selain itu juga dalam ketepatan sasaran diperlukan pendataan ulang masyarakat calon KPM dan lebih teliti dalam melihat target sasaran, agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran, karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar PKH.
2. Pada indikator integrasi, PKH diharapkan mengikutsertakan Pangulu Nagori Kandangan dalam hal pendataan KPM yang merupakan bagian yang paling mengerti kondisi masyarakat di Nagori tersebut. Selain itu, masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih rutin lagi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait PKH baik tujuan PKH, kegunaan PKH, pemikiran masyarakat, serta memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan kepada masyarakat.
3. Pada indikator adaptasi, PKH perlu melihat setiap perubahan yang ada pada KPM PKH dan harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh KPM PKH agar masyarakat lebih mandiri dan bisa mengatur kegiatan ekonomi dengan memberikan modal untuk KPM PKH dalam mendirikan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, <https://pkh.kemensos.go.id> diakses pada 05 April 2021 pukul 10:42 WIB).
- \_\_\_\_\_, [https://pkh.kemensos.go.id/?pg=detail\\_berita&id=381&c=Target-Graduasi-KPM](https://pkh.kemensos.go.id/?pg=detail_berita&id=381&c=Target-Graduasi-KPM) -PKH-Tahun-2020-Lampau-Target- diakses pada 24 Desember 2020 pukul 13:54 WIB).
- Arum, Ananda Dwi. 2022. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin di Nagori Kandungan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun*. Medan : USU.
- Bps.go.id, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses pada 22 Desember 2020 pukul 15:26 WIB).
- Kemensos.go.id, <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses pada 29 Maret 2021 pukul 21:20 WIB).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN. Mangkunegara.
- Nasional.kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-pertumbuhan-ekonomi-2020-bisa-minus-22> diakses pada 22 Desember 2020 pukul 16:06 WIB).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.